

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI III DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
KE
KANTOR BAPPEDA PROV. JAWA BARAT
DAN
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROV. JAWA BARAT
DI BANDUNG



PADA TANGGAL 27 S.D 30 JANUARI 2020

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
KOMISI III DPRD PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

**KE
KANTOR BAPPEDA PROV. JAWA BARAT
DAN
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROV. JAWA BARAT
DI BANDUNG**

I. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 04/DPRD/2010 Tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Januari 2020;
3. Jadwal Kegiatan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Januari 2020.
4. Surat Tugas Dewan Nomor : 093/ / DPRD/2020 Tanggal 24 Januari 2020
5. Surat Tugas Sekretariat Nomor : 094/ /Setwan/2020 Tanggal 24 Januari 2020

II. TEMPAT, TANGGAL, WAKTU, MAKSUT/ TUJUAN, ANGGOTA YANG DITUGASKAN, PEJABAT PENERIMA, HASIL PERTEMUAN DAN KESIMPULAN

❖ PERTEMUAN HARI SELASA, TANGGAL 28 JANUARI 2020

- Tempat : Kantor BAPPEDA Provinsi Jawa Barat
- Hari / Tanggal : Selasa, 28 Januari 2020
- Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
- Maksud dan Tujuan : Kunjungan Kerja ke Luar Daerah Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Rapat Kerja dengar pendapat Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
- Anggota Yang ditugaskan
 1. Amri Cahyadi, ST
 2. Efredi Effendy
 3. Rina Tarol, SE
 4. Ferdiansyah, A.Md
 5. H. Aksan Visyawan, S.ST, MH
 6. Firmansyah Levi
 7. Rudi Hartono
 8. Eka Budiarta, S.Mn, M.Si
 9. Ir. Hendriyansen
 10. Ir. H. azwari helmi
 11. Herwina
 12. Fitriani, A.Md
- Pejabat / tokoh penerima di Tempat Tujuan :
 - 1) Eko Priastono (Sekretaris BAPPEDA Prov Jawa Barat)
 - 2) Agus Supriadi (Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan BAPPEDA Prov Jawa Barat)

- Hasil Pertemuan

BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT

Dari pertemuan antara Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat di Bandung , dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterima langsung oleh Bapak Eko Priastono (Sekretaris BAPPED Provinsi Jawa Barat) dan Beberapa Kasubbag dan Staf yang ada di BAPPEDA Provinsi Jawa Barat di Bandung .
 2. Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Masih Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 3. Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melakukan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah menggunakan program/ alat yang disebut E-planning
 4. E-Planning ini merupakan alat atau program untuk melakukan penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan, sistem ini langsung dipantau oleh pusat. Sistem ini juga bisa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyampaikan masukan terkait pembangunan untuk daerahnya dengan cara masuk aplikasi dengan menggunakan NIK perorangan.
 5. Adapun kelebihan dari E-planning ini dapat menampung/mengakomodir pokok-pokok pikiran (Pokir) dan aspirasi masyarakat yang terjaring melalui kegiatan reses DPRD , hearing maupun rapat dengar pendapat.
 6. Pokir DPRD Harus disampaikan paling lambat pada tanggal 01 April atau sebelum musrembang Provinsi dan pengimputan untuk usulan pembangunan pada tahun 2021 terakhir pada tanggal 10 juni 2020
- Pertanyaan :
 - 1) Amri Cahyadi
 - Menanyakan tentang bagaimana Proses Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerahnya?
 - Bagaimana cara pengimputan pokok pikiran dari DPRD Provinsi Jawa Barat melalui sistem e-planning?
 - 2) Aksan Visyawan
 - Di Provinsi Jawa Barat Apa masih ada dana daba dari provinsi untuk kabupaten?
 - Cara mengakomodir pikir-pikir dewan?
 - Siapa yang membuat pagu anggaran untuk provinsi jawa barat?
 - 3) Hendriyansen
 - Terkait permasalahan yang disampaikan masyarakat dalam reses banyak permasalahan itu wilayah kabupaten apakah bisa provinsi langsung membantu dengan dana provinsi?? Kalaw ada dengan bagaimana mekanismenya??
 - 4) Eka Budiarta
 - Bagaiman Peran politik yang ada di Provinsi Jawa Barat dalam memberi dana bantuan sosial dan lainnya yang ada di Provinisi Ke Kabupaten dan Apa saja yang menjadi Tolak Ukur dalam hal pemberian dana batuan dari provinsi ke Kabupaten?
 - 5) Hellyana
 - Terkait Bantuan dari Pusat Ke Daerah bagaimana prosesnya

▪ JAWABAN

- 1) Untuk Tahun 2020 Bappeda Provinsi Jawa Barat Hanya Melakukan Pengimpunan RKPD, sedangkan untuk KUAPPAS dilakukan oleh BPKD, namun dalam pembentukan KUA PPAS merupakan hasil dari RKPD yang sudah di buat oleh Bappeda.
- 2) Untuk Bappeda Provinsi Jawa Barat sendiri dalam perencanaan pembangunan saerah menggunakan proses pendekatan, meliputi 7 Pendekatan anantara lain :
 - a. Teknokratik (mengunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah)
 - b. Partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan)
 - c. Politis (dilaksanakan dengan menrterjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih kedalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan jangka menegah yang dibahas bersama DPRD)
 - d. Atas-bawah dan bawah-atas (merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan dari desa, ke kecamatan, ke kabupaten , ke provinsi , hingga nasional)
 - e. Holistik-tematik (membertimbangkan segala unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai faktor potensi, tantangan, hambatan , permasalahan yang saling berkaitan satu sama lainnya)
 - f. Integratif (menyatukan kewenangan)
 - g. Spasial (mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan)
- 3) Terkait Mekanisme Bantuan Keuangan ada beberapa tahap yang harus diperhatikan jadi pikir yang ada akan dimasukan kedalam musrenbang provinsi dan disanalah apa saja yang dianggap penting maka itu akan didahulukan dan batuan ini ahrus dikasih ke kabupaten mana di musrenbang provinis ini menentukan, yang dimusrenbang ini kita dapat tau bahwa bantuan ini apa bisa dilaksanakan oleh OPD atau dn lain sebagainya, pembagian ini harus dilihat dari wewenang dan urusanya dulu baru bisa dikasih.
- 4) Di provinsi Jawa barat aspirisi masyaraka yang dituangkan dalam reses DPRD biasanya sudah ditampung dalam pikir dan dimasukan dalam musrenbang
- 5) Untuk bantuan keuangan dari provinsi Jawa Barat melalui pendekatan dan tidak dibagi rata ke daerah masing masing, pendekatan secaraTeknokratik (mengunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah) dari menghitung jumlah penduduk, kondisi daerah masing – masingdan kecapaian kinerja kabupatennya, dukungan mereka terhadap program program Provinsi dan lain sebagainya).
- 6) Di Provinsi Jawa barat masih ada bantuan keuangan dari provinis Ke Kabupaten yang mana dana untuk bantuan itu sendiri cukup besar dan dana ini juga dana yang merupakan milik provinsi tapi digunakan untuk bantuan di kabupaten.
- 7) Terkait pengawasan pihak provinsi jawa barat masih sering berkonsultasi ke pihak kemendagri terkait program pemangunan dijawa barat dan untuk sistem provinsi jawa barat diawasi oleh KPK
- 8) Terkait bantuan dana dari pusat kejelasanya biasanya didapat di akhir tahun anggaran , kalaw untuk DAK sendiri biasanya diketahui saat pembentukan RAPBD dimasukan dana DAK dari pusat.
- 9) Terkait Anggaran merupakan kewenangan Dewan, sedangkan esekutif hanya merencanakan.
- 10) Pokir yang diterima oleh hasil reses Dewan akan diakomodir oleh Bappeda ke Perangkat Daerah yang membidangnya dan disaat musrenbang lah menentukan pokok pikiran mana yang diprioritaskan, dan kewewenangan siapa dan bantuan ini dikelola siapa.
- 11) Dan Bappeda Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah selalu melibatkan DPRD untuk mengetahuinya dengan cara mengundang DPRD dan perangkat daerah dalam program penyusunan Program program pembangunan mereka.

▪ **Kesimpulan :**

Kesimpulan dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Koordinasi terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat di Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melakukan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah menggunakan program/ alat yang disebut E-planning, E-Planning ini merupakan alat atau program untuk melakukan penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan, sistem ini langsung dipantau oleh pusat. Sistem ini juga bisa digunakan oleh masyarakat luas untuk menyampaikan masukan terkait pembangunan untuk daerahnya dengan cara masuk aplikasi dengan menggunakan NIK perorangan. Pokir DPRD Harus disampaikan paling lambat pada tanggal 01 April atau sebelum musrembang Provinsi dan pengimputan untuk usulan pembangunan pada tahun 2021 terakhir pada tanggal 10 juni 2020 Dan Terkait Mekanisme Bantuan Keuangan ada beberapa tahap yang harus diperhatikan jadi pikir yang ada akan dimasukkan kedalam musrembang provinsi dan disanalah apa saja yang dianggap penting maka itu akan didahulukan dan batuan ini harus dikasih ke kabupaten mana di musrembang provinis ini menentukan, yang dimusrenbang ini kita dapat tau bahwa bantuan ini apa bisa dilaksanakan oleh OPD atau dan lain sebagainya, pembagian ini harus dilihat dari wewenang dan urusanya dulu baru bisa dikasih.

❖ **PERTEMUAN HARI RABU, TANGGAL 29 JANUARI 2020**

- Tempat : Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
- Hari / Tanggal : Rabu, 29 januari 2020
- Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
- Maksud dan Tujuan : Kunjungan Kerja keLuar Daerah Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Rapat Kerja Dengar Pendapat terkait Sistem Penangan Banjir di Provinsi Jawa Barat.
- Anggota Yang ditugaskan
 1. Amri Cahyadi, ST
 2. Efredi Effendy
 3. Rina Tarol, SE
 4. Ferdiansyah, A.Md
 5. H. Aksan Visyawan, S.ST, MH
 6. Firmansyah Levi
 7. Rudi Hartono
 8. Eka Budiarta, S.Mn, M.Si
 9. Ir. Hendriyansen
 10. Ir. H. azwari helmi
 11. Herwina
 12. Fitriani, A.Md
- Pejabat / tokoh penerima :
 1. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
 2. Staf Dina Bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Jawa Barat

- Hasil Pertemuan

Dari pertemuan antara Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas Bina Marga dan Penataan ruang Provinsi Jawa Barat di Bandung , dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Kunjungan Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterima langsung oleh Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan ruang Provinsi Jawa Barat dan Beberapa Staf Dinas Bina Marga dan Penataan ruang Provinsi Jawa Barat.
2. Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertanyakan Bagaimana cara Provinsi Jawa Barat mengatasi Permasalahan yang ditimbulkan oleh Banjir yang banyak menimbulkan kerusakan-kerusakan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya yang mana Dana yang dari Provinsi sudah disahkan? Sedangkan infrastruktur itu secara prioritas harus diperbaiki contohnya jalan yang putus yang mana dana dalam penganggarannya sebelumnya tidak ada untuk perbaikan tersebut.
3. Untuk Anggaran Dinas bina Marga dan Penataan Ruang Prov. Jawa Barat sebesar Rp. 1.600.000.000.000,- ini sudah termasuk biaya belanja langsung dan tidak langsung.
4. Tekait permasalahan yang diatas bahwa pada dasarnya bencana alam ini untuk penanganaya oleh bencana yang didefinisikan untukan bina marga dan penataan ruang contohnya (longsong dan pohon tumbang dan lain lain) dan bencana secara umum yang untuk penanganan daruratnya ditangani oleh Badan Penagulangan Bencana Daerah, dan untu prosedurnya bahwa ada pernyataan dari kepala daerah bahwa itu perlu bantuan maka dari BPBD akan menindaklanjutinya karena mereka memiliki dana tanggap darurat untuk bencana, sedangkan di dinas bina marga sendiri hanya memiliki dana rutin untuk perbaikan jalan dan jembatan, yang bisa diunakan untuk pembuangan tanah perbaikan saluran air yang bentuknya rutin pertahun.
5. Anggota komisi III mempertanyakan apakah bisa dana yang ada diprovinsi bisa digunakan langsung untuk membantu masyarakat akibat banjir ini di desa-desa terpencil yang bukan merupakan wewenang provinsi?
6. Selain itu Anggota Komisi III mempertanyakan adakah program Jangka Panjang dari Provinsi Jawa Barat ini untuk pennganan akibat banjir?
7. Terkait dana yang diberikan untuk desa-desa terpencil yang bukan merupakan wewenang provinsi bisa menggunakan dana bantuan keuangan di Jawa Barat ini dinas bina marga merupakan salah satu dinas yang memverifikasi usulan usulan bantuan yang sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh bina marga yang diberikan provinsi melalui dana batuan keuangan, maka dari itu sebaiknya membuat proposal bantuan keprovinsi dan ditembuskan ke dinas terkait untuk dapat membatu dalam bentuk rekomendasi untuk bantuan ke daerah tersebut
8. Dinas bina marga sendiri sudah memiliki program jangka panjang untuk mengatasi banjir dan penaganan limbah yang ada sungai dengan cara membentuk satgas, dan untuk sekarang bina marga sudah membangun terowongan air, dan program jangka panjang ini sudah berkerja dengan provinsi lain untuk penanganan banjir dan limbah ini.

- **KESIMPULAN :**

Kesimpulan dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka Koordinasi terkait Sistem Penanganan Air adalah sebagai berikut bahwa dalam penanganan awal terkait kerusakan jalan dan infrastruktur yang diakibatkan oleh bajir bisa menggunakan dana yang ada di Dinas Marga dan BPBD Provinsi yang bersifat sementara dan setelah itu dilakukan perubahan anggaran atau dianggakran pada tahun selanjutnya yang dilakukan oleh DPRD dan eksekutif untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh (permanen) terhadap jalan atau yang lainnya. Selain itu juga dengan cara memperbesar jumlah anggaran perbaikan rutin untuk jalan dan yang lainnya

III. REKOMENDASI

1. Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merekomendasikan untuk kepada Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat duduk satu meja dalam mengakomodir dan mengawal pokok pikiran yang dituangkan masyarakat dalam hasil reses DPRD untuk dapat diusulkan/ dibantu dan dimasukkan dalam program perencanaan pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dana APBD tahun 2021 selanjutnya.
2. Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merekomendasikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus Mempunyai Program Jangka Panjang untuk mengatasi banjir yang ada di Bangka Belitung.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pangkalpinang, Januari 2020

KETUA

EFREDI EFFENDY